

## ABSTRAK

Korupsi di Indonesia semakin marak tiap tahunnya, tingkat korupsi di Indonesia pada tahun 2022 menduduki peringkat 110 dengan skor 34. Skor tersebut turun dari tahun sebelumnya, hal tersebut menandakan meningkatnya praktik korupsi di Indonesia. Kebanyakan pelaku utama dalam Tindak Pidana Korupsi adalah pejabat atau petinggi pemerintahan, sehingga membuat masyarakat tidak percaya oleh pemerintahan. Pemerintah harus membalikkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan efektivitas dari program pemberantasan korupsi, seperti kuatnya pengawasan desentralisasi fiskal, pertanggungjawaban yang akuntabel dan kinerja keuangan pemerintahan yang efisien.

Penelitian ini bertujuan membuktikan efektivitas dari program tersebut. Aspek-aspek yang diteliti meliputi desentralisasi fiskal, akuntabilitas yang diukur dengan opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi yang diukur dengan investasi daerah.

Objek penelitian ini adalah 34 pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018-2022 dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Statistik Tindak Pidana Korupsi yang diterbitkan KPK, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari website Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas pemeriksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Setelah melewati proses *sampling* terdapat 122 sampel yang memenuhi kriteria dari 170 populasi pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan software Economic Views (Eviews).

Terdapat pengaruh secara simultan signifikan terhadap tingkat korupsi, tetapi variabel independen pada penelitian hanya mampu menjelaskan sebesar 4.4% dan sisanya 95.6% di jelaskan variabel lainnya. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh positif signifikan pada penelitian ini, hal tersebut bisa menjadi acuan untuk pemerintah mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik dalam penanganan kasus korupsi, dengan melakukan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat. Hal tersebut berguna untuk menerapkan fungsi dan tujuan desentralisasi fiskal yang efektif.

Penelitian ini masih banyak keterbatasan, keterbatasan tersebut bisa menjadi bahan untuk pengembangan penelitian ini. Saran dari peneliti adalah gunakan variabel lain yang memungkinkan untuk mengungkapkan indikasi korupsi, perluas objek penelitian dan periode penelitian.

**Kata Kunci:** Korupsi, Desentralisasi, Akuntabilitas, Kinerja Keuangan, Pemerintah Provinsi